



**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP DI
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER
LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.M.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



Oleh

Arlyn Trinawangsih
NIM. 020903101066

Dosen Pembimbing
Drs. Mud'har Syarifudin, MSi
NIP. 131 577 295

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2005

Asal :	Hadiah	Klass
Terima Tgl :	Pembelian 09 MAR 2006	336.24
Induk :		TRI
Pengkatalog :		sp

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

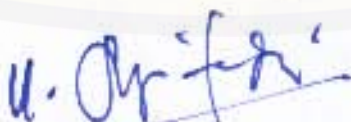
PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Arlyn Trinawangsih
NIM : 020903101066
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Pegawai Tetap di PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Jember, Mei 2005

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. Mud'har Syarifudin, MSi

NIP. 131 577 295

PENGESAHAN

Laporan Hasil praktek Kerja Nyata telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Januari 2006
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua



Dra. Sri Wahyuni, Msi

NIP. 131 658 389

Sekretaris



Drs. H. Mud'har Syarifudin, M.Si

NIP. 131 577 295

Anggota



Drs. Didik Eko Julianto

NIP. 131 832 303

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Ungg. Nardia, B.Sw, Ms.

NIP. 130 674 836

PERSEMBAHAN

Laporan ini Penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Gatot Wahyuwadi dan Ibu Indarsih yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta yang selalu memberikan doa dan dorongan secara moral maupun material bagi keberhasilan Anda
2. Mas Heru, Mas Aries, Lusi, Waran, Arie, Mbak Aji, Mbak Meme, Elina, Kinantara tersayang yang telah mendorong dan mendukung aku selama kuliah.
3. Cintaku Tiqi Dwi Asmara (Toro) atas kasih sayang, cinta, perhatian serta dukungannya selama ini, none kayak tero jangan pernah bosan sama aku.

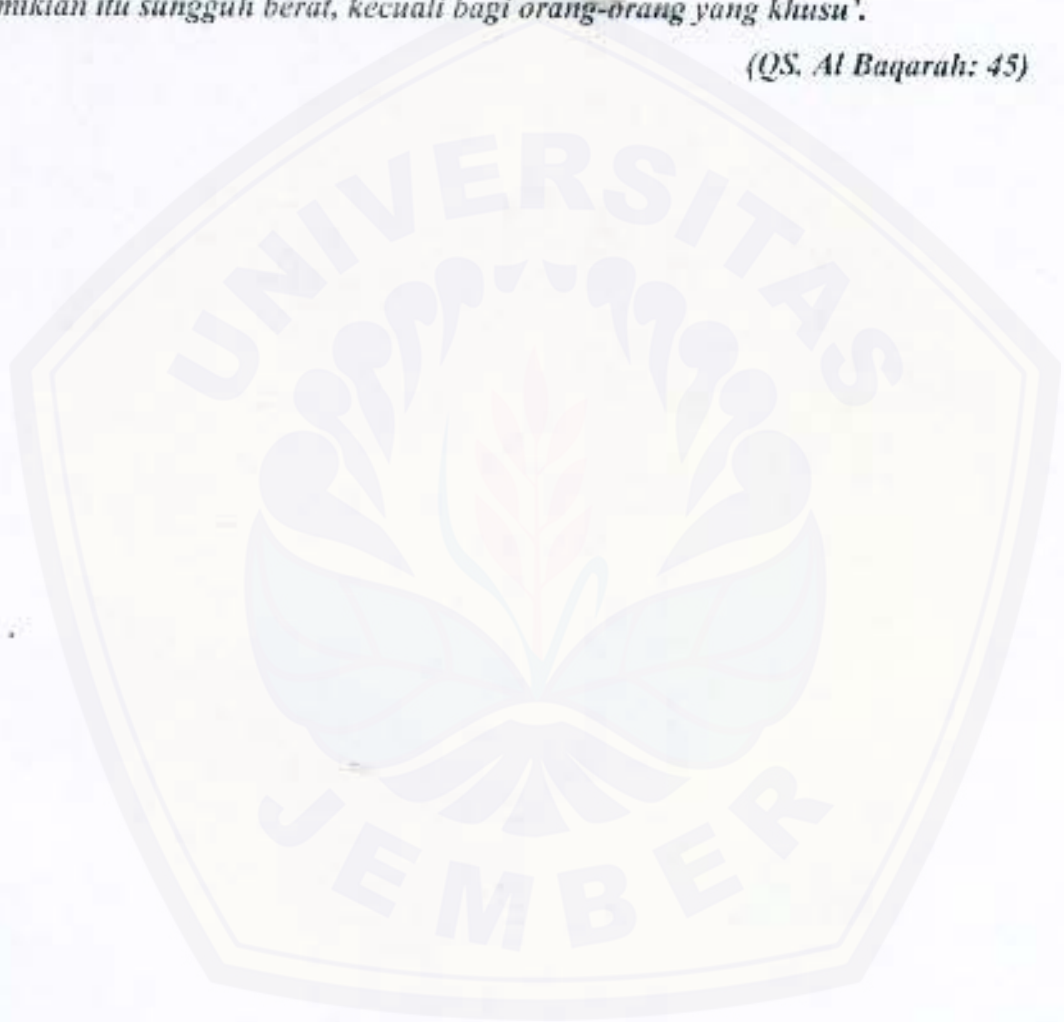
MOTTO

Orang bijak, taat pajak

(Dirjen Pajak)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu'.

(QS. Al Baqarah: 45)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini dengan judul **"Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap di PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember"**.

Penulisan laporan ini dapat tersusun berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia, BSW, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Ardijanto, M Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
3. Bapak Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. H. Mud'har Syarifudin, M Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan pada Penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini
5. Bapak Drs. Didik Eko Julianto selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, saran dan tuntunan pada penulis selama menyelesaikan kuliah DIII Perpajakan
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember
7. Bapak Drs. Saiful Echwan selaku Pimpinan PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang telah berkenan memberikan izin tempat sebagai sarana Penulis melakukan PKN.
8. Bapak Poerwadi selaku Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
9. Bapak Ismail selaku Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia, Bapak Sukarno selaku pembimbing di lokasi PKN, Bapak Swandaka, Ibu Siti

Fathonah, Mas Udin, Mas kholiq, terima kasih atas kebaikannya selama ini dan segenap staf maupun karyawan PT.Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

10. Teman-temanku Diploma III Perpajakan Angkatan 2002 Khususnya Kelas B.
11. Sahabatku Erdien, Dewi, Lisa, Elok, Ineke waktu bersama kalian dibangku kuliah tak akan pernah aku lupakan.
12. Boss, Cephie, Icha, Fhaik, Ocha, Berty, Maria, Ika, Eni, Dian, Farida, dan mas Yudi serta teman-temanku semua Dimaestro Terima kasih Atas dukungannya Selama ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan kerjasama hingga terseleainya laporan ini.

Penulis menyadari dalam pengungkapan, penyajian, dan pemilihan, kata-kata dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, maka penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat guna perbaikan laporan ini.

Besar harapan penulis, semoga laporan ini bermanfaat dan diterima oleh pembaca.

Jember, 25 Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO).....	4
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api.....	4
2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda.....	4
2.1.2 Jaman Penjajahan Jepang.....	5
2.1.3 Masa Proklamasi.....	5
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.....	7
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.....	7
2.2.2 Deskripsi Jabatan.....	10
2.3 Lokasi Dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.....	17

2.3.1	Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	17
2.3.2	Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	17
2.4	Personalia	18
2.4.1	Keadaan Karyawan	18
2.4	Uraian Tugas Sumber Data Utama	18
III.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	21
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	21
3.1.1	Pelaksanaan Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) PT. Kereta Api DAOP IX Jember ...	24
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Wajib Pajak	26
IV.	PENUTUP	43
	DAFTAR PUSTAKA	44
	LAMPIRAN	

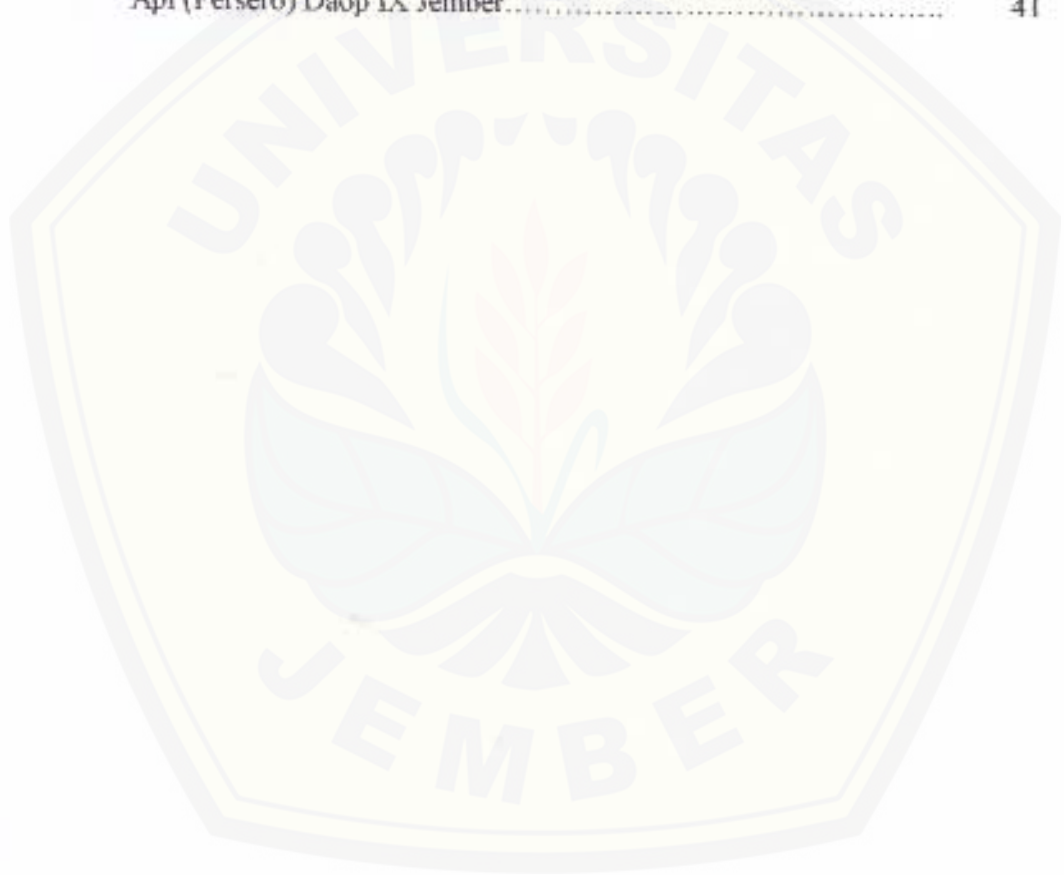
DAFTAR TABEL.

Tabel	Halaman
2.1 Daftar Stasiun Di Daop IX Jember.....	14
3.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.....	9
2.2 Peta Wilayah DAOP IX Jember	16
2.3 Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.....	19
3.1 Mekanisme Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
4. Daftar Kegiatan Bimbingan Laporan Akhir
5. Surat Pengeluaran Uang
6. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21
7. Surat Setoran Pajak
8. Bukti Pemotongan PPh pasal 21
9. Bukti Pembayaran
10. Jumlah Pegawai Tetap

I. PENDAHULUAN

i.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan dana dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya terus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri RI merupakan pelengkap, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dana yang bersumber pada penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut harus ditingkatkan dengan cepat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan negara adalah dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (uang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH). Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa pajak mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan negara khususnya didalam pembiayaan pembangunan, karena pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah (budgetair). Pajak juga berfungsi sebagai regulerend, maksudnya sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasno, 2001: 2).

Keberadaan pajak sebagai pemasok dana yang paling utama di dalam pembangunan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu pemasok pajak yang cukup besar bagi negara. Karena pajak penghasilan menyangkut obyek yang cukup luas, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan dari Pegawai tetap kereta api.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan dari pegawai tetap sangat menarik untuk dibahas, untuk itu penulis mengangkat tema diatas untuk

dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan laporan akhir yang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) nya di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Direktoran Jenderal Pajak menerapkan ketentuan yang mengatur masalah tersebut yaitu tentang pembayaran pajak penghasilan atas pembayaran pajak penghasilan pegawai tetap. Dalam UU No. 7 tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi yang akhirnya diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dan PP No. 149 tahun 2000 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal, dan telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya dari angkutan darat.

Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) di dalam pelayanannya tidak hanya melayani masyarakat dalam hal jasa angkutan, tapi juga melayani dalam hal persewaan tanah dan atau bangunan baik kepada orang pribadi maupun badan. PT. Kereta Api (Persero) sebagai BUMN banyak sekali melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan yaitu antara lain PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh, PBB dan pajak-pajak lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember ini, penulis mengangkat judul "TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER"

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah ingin :

- Mengetahui secara langsung tentang prosedur pelaksanaan PPh pasal 21 atas pegawai tetap PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan dari Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk :

- a. Menambah pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- b. Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh khususnya dalam perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
- c. Membandingkan dan sekaligus menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek langsung khususnya tentang pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir pada jaman penjajahan Belanda kurang lebih pada tahun 1867 dan berjalan sampai dengan sekarang ini. Dari uraian diatas perkeretaapian dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda dimulai tahun 1864 baru dibangun jalan kereta api oleh *Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij* (NISM) dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan Desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km dengan tebal rel 1435 mm. Jalan Kereta Api ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Pembangunan jalan kereta api selanjutnya dilakukan juga di beberapa daerah seperti di pulau Jawa, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh *Staat Spoorwegen* (SS), sedangkan untuk daerah Sumatra Utara dilakukan oleh *Deli Spoorwegen Maatschappij* (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

1. SCSM (*Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij*)
2. SJSM (*Semarang Joana Stoomtram Maatschappij*)
3. SDSM (*Serajudal Stoomtram Maatschappij*)
4. OJSM (*Oost Java Stoomtram Maatschappij*)
5. KSM (*Kediri Stoomtram Maatschappij*)
6. MSM (*Malang Stoomtram Maatschappij*)
7. MdSM (*Modjokerto Stoomtram Maatschappij*)
8. PsSm (*Pasoeroean Stoomtram Maatschappij*)
9. PdSm (*Probolinggo Stoomtram Maatschappij*)
10. Mad. SM (*Madura Stoomtram Maatschappij*)
11. NIT (*Nederlandsch Traweg Maatschappij*)
12. BET (*Batavai Electriche Maatschappij*)
13. BSJ (*Babat jombang Stoomtram Maatschappij*)

2.1.2 Jaman Penjajahan Belanda

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September 1945 dijadikan sebagai hari berdirinya Kereta Api Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Pada tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigitanya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari

hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan pekerjaan Umum No.2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKA beserta kekayaannya, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA menjadi PNKA

Berdasarkan UU No.56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api semua dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambah rel semakin berkurang, jalan rel, gedung, dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No.19 tahun 1960 dan peraturan pemerintah No.22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA ditebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan peraturan pemerintah No.6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api)

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi atas inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui keputusan Menteri Perhubungan No.42 tahun 1989 mulai berlaku

struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang.

Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah No.57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan tersebut PERUMKA semakin membaik dan sekarang berkembang pesat, sehingga berdasarkan peraturan No19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusan RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA API (PERSERO).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam rangka mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagaimana diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi PERSERO beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus lebih bisa mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerjasama yang menguntungkan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

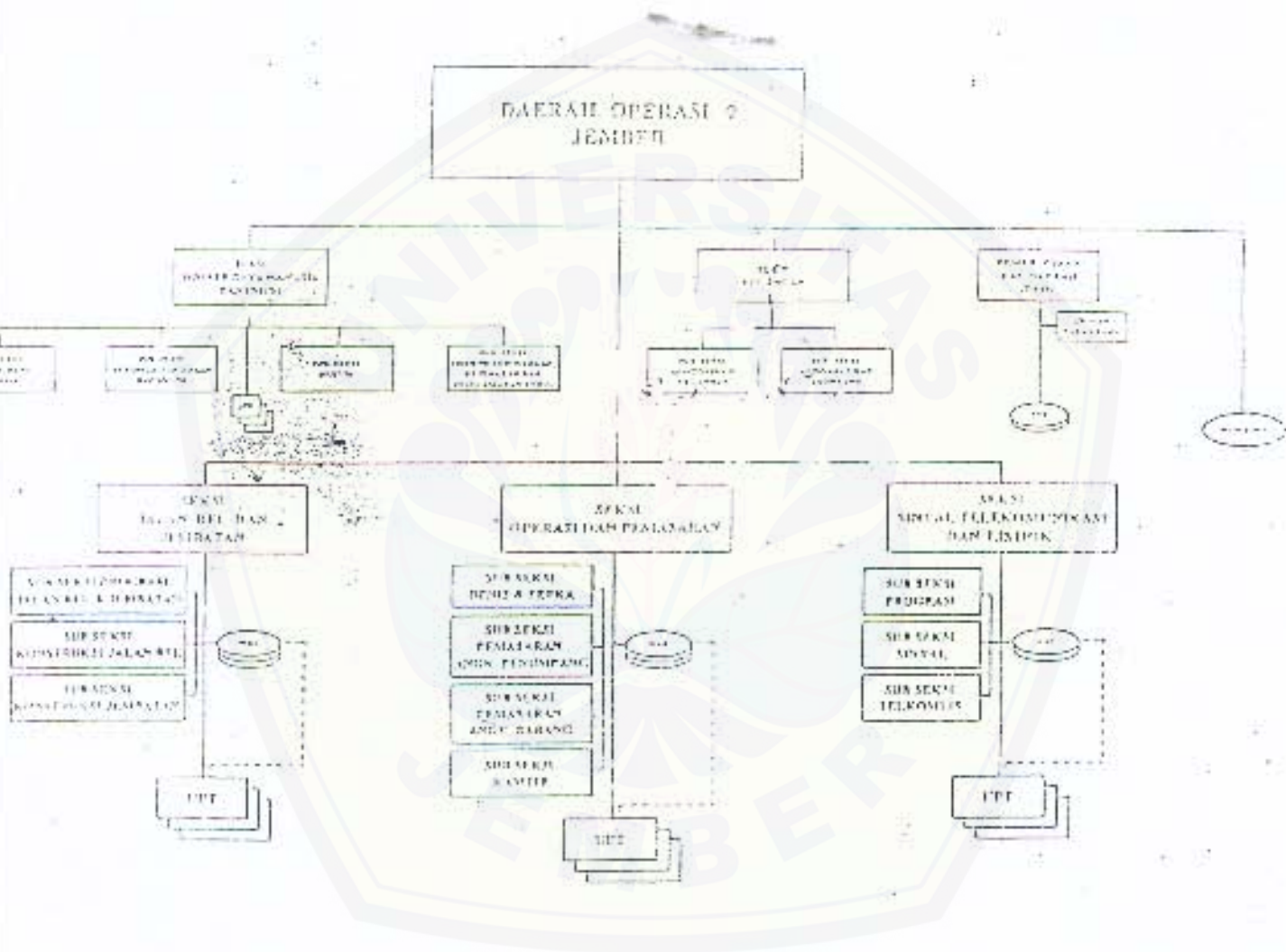
Adapun susunan organisasi PT. Kereta Api DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Daerah Operasi IX Jember

2. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)
3. Kepala Seksi Hyperkes Dan Keselamatan Kerja
4. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)
5. Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS)
6. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA TPK Rambipuji)
7. Kepala Seksi Jalan Rel Dan Jembatan
8. Kepala Seksi Operasi
9. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (KASI SINTELIS)
10. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan
11. Unit Pelaksanaan Tekhnis (UPT)

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) masing-masing KADAOP di dalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksanaan Tekhnis) sedangkan di dalam melaksanakan tugasnya, UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun). Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tampak pada gambar berikut :

TABEL 2.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER



2.2.2 Diskripsi Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tujuan, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi. Adapun susunan organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah IX Jember sebagai berikut :

a. Kepala Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh Dinas DAOP IX, juga sebagai penanggungjawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengadakan rencana umum di dalam organisasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

b. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)

Kasi ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Kepala Sub Seksi SDM

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan penarikan tenaga kerja baru di lingkungan Daop IX Jember.

2) Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan Daop IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

3) Kepala Sub Seksi Urusan Umum

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip)

4) Kepala Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan Daop IX Jember.

5) Kepala Sub Seksi Hukum

Bertugas mengurus segala macam masalah yang berkaitan dengan hukum, contohnya : terjadi kecelakaan antara KA dengan KA atau KA dengan kendaraan lain.

c. **Kepala Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja**

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah Daop IX Jember.

Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri atas :

- 1) Sub Seksi Hyperkes
- 2) Sub Seksi Keselamatan Kerja

d. **Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)**

Dalam melaksanakan tugasnya PMKD dibantu oleh Pemeriksa Kas Stasiun dan bagian Tata Usaha.

e. **Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)**

1) Tugas Kepala Humasda

- a) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada di bawah tanggung jawab KADAOP.
- b) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember perkembangan pekeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Daop IX Jember.

2) Fungsi Humasda

- a) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian ke dalam lingkungan perusahaan.
- c) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d) Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan ke dalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran di luar perusahaan.
- g) Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja Daop IX Jember.
- h) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

f. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA TPK Rambipuji)

g. Kepala Seksi Jalan Rel dan Jembatan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu:

1) Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala aktivitas yang berhubungan dengan dinas Jalan Bangunan di Daop IX Jember.

2) Sub Seksi Jembatan

3) Sub Seksi Jalan Rel

h. Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran

Dalamnya melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi :

1) Sub Seksi Operasi Teknis dan Perjalanan KA

a) Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di Daop IX Jember .

b) Bertugas dan bertanggung jawab mengatur KA di Daop IX Jember.

- 2) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang
- 3) Sub Seksi Pemasaran Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran angkutan barang.
- 4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

i. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.
- 2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
- 3) Sub Seksi Sinyal
Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah persinyalan

Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX

Jember di lintas disusun sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| a) Seksi Sinyal III Klakah | = Distrik sinyal III A Klakah |
| b) Seksi sinyal 112 B Bangil | = Distrik sinyal 112 Jember |
| | = Distrik sinyal 112 B Kalibaru |
| c) Seksi Telekomunikasi Klakah | = Distrik Telekomunikasi III A Klakah |
| d) Seksi Telekomunikasi 112 A Jember | = Distrik Telekomunikasi 112 A Jember |

j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi yaitu :

- 1) Sub Seksi Program
Bertugas bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinas tanah dan bangunan di Daop IX Jember.

- 2) Sub Seksi Tanah
- 3) Sub Seksi Bangunan

k. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi Daop (KADAOP), dimana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.



Tabel 2.1 Daftar Stasiun Di Daop IX Jember

Stasiun Klas I	Stasiun Klas II	Stasiun III
a) Stasiun Jember	a) Stasiun Klakah	a) Stasiun Rejoso
b) Stasiun Probolinggo	b) Stasiun Pasuruan	b) Stasiun Grati
c) Stasiun Banyuwangi	c) Stasiun Tanggul	c) Stasiun Bayeman
	d) Stasiun Rambipuji	d) Stasiun Leoes
	e) Stasiun Sukowono	e) Stasiun Malasan
	f) Stasiun Bondowoso	f) Stasiun Ramyoso
	g) Stasiun Kalibaru	g) Stasiun Randuagung
	h) Stasiun Situbondo	h) Stasiun Jatiroto
	i) Stasiun Kalistail	i) Stasiun Bangsalsari
	j) Stasiun Temuguruh	j) Stasiun Mangli
	k) Stasiun Rogojampi	k) Stasiun Arjasa
	l) Stasiun Karangasem	l) Stasiun Kotok
		m) Stasiun Sukowono
		n) Stasiun Tamanan
		o) Stasiun Grojogan
		p) Stasiun Bonosare
		q) Stasiun Prajekan
		r) Stasiun Widuri
		s) Stasiun Ledokombo
		t) Stasiun Sempolan
		u) Stasiun Garahan
		v) Stasiun Mrawan
		w) Stasiun Glenmore
		x) Stasiun Sumberwadung
		y) Stasiun Singojuruh
		z) Stasiun Panarukan
		aa) Stasiun Argopuro

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan ada pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian :

a. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

b. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember berkedudukan di daerah kota administratif Jember, tepatnya di Kecamatan Patrang, Kelurahan Jember Lor dengan alamat Jalan Dahlia No. 2 Jember. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113^{d} BT dan 8^{d} LS serta pada ketinggian ± 83 m dari permukaan air laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Luas wilayah Daop IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal Bangil dan utara sampai Panurakan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

a. Lintas Raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

b. Lintas Cabang

Lintas cabang ini yang masin beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga kerja PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam peraturan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

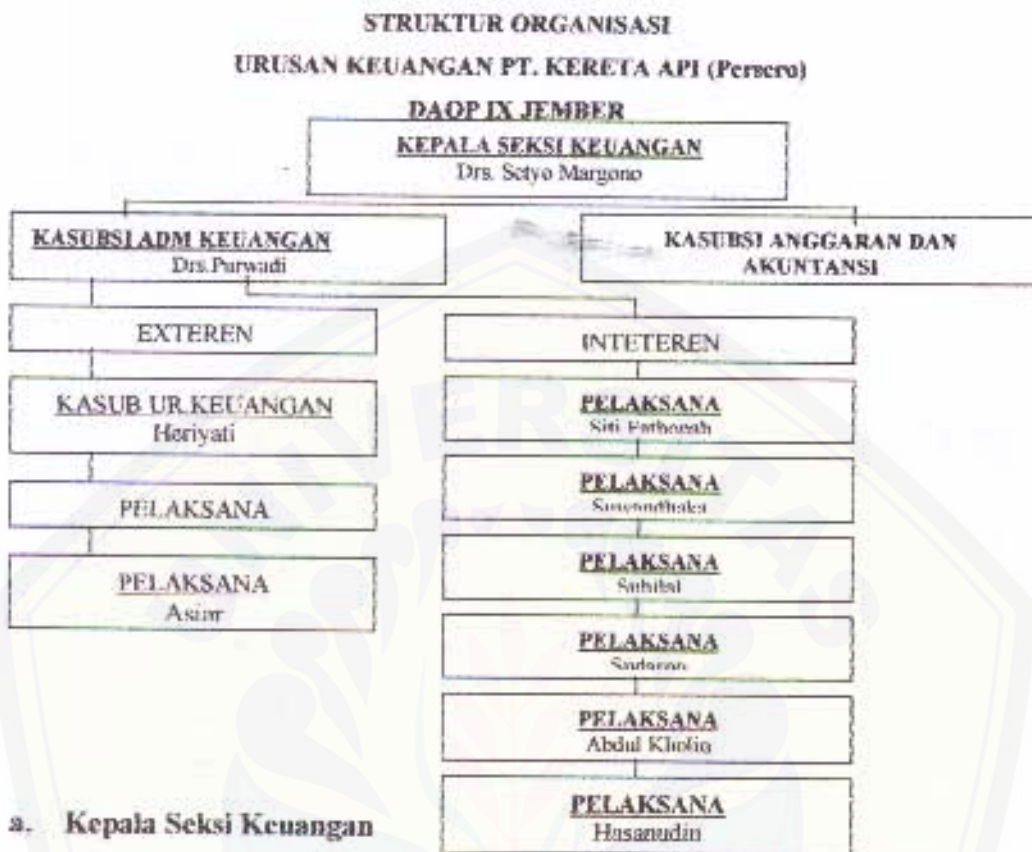
c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai berikut :

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero)
Daop IX Jember



a. **Kepala Seksi Keuangan**

Kepala seksi Keuangan adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan.

b. **Kepala Sub Administrasi Keuangan**

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala Kereta Api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada kepala urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan. Tanggung jawab Kepala Sub Administrasi Keuangan adalah : Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada kas negara atas akibat dari pembayaran itu. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang

disahkan/ditandatangani atas namanya. Arti pengesah itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero). Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh KADAOP lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan tersebut.

c. Kepala Sub Urusan Keuangan

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- 1) Gaji pegawai
- 2) Emolumen
- 3) Perjalanan dinas
- 4) Sewa rumah/pemondokan
- 5) Honor pegawai

d. Pelaksana I

Sebagai pelaksana dari Kepala Sub Urusan I yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Membuat daftar gaji
- 2) Membuat mutasi-mutasi pegawai
- 3) Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

e. Pelaksana II

Sebagai pelaksana dari Kepala Sub Urusan II mempunyai tugas antara lain:

- 1) Membuat tagihan-tagihan kepada pihak rekanan
- 2) Mengecek dan meneliti tagihan-tagihan dari pihak rekanan
- 3) Membuat :
 - a) Bukti pembelian barang langsung atau jasa pemborong (A. 13A)
 - b) Bukti pembayaran (A9)
 - c) Daftar bukti pembelian barang langsung atau jasa pemborong (L7)
- 4) Memasukkan tagihan-tagihan pada kartu hutang pada rekanan (F.13)
- 5) Mengecek faktur pajak yang dibuat oleh pihak rekanan
- 6) Membuat faktur pajak standar dan surat setoran pajak
- 7) Mengisi formulir SPT Masa PPN dan PPh BM, PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 23, PPh pasal 25 (PPh Badan)
- 8) Menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang ke KPP setempat.

IV. PENUTUP

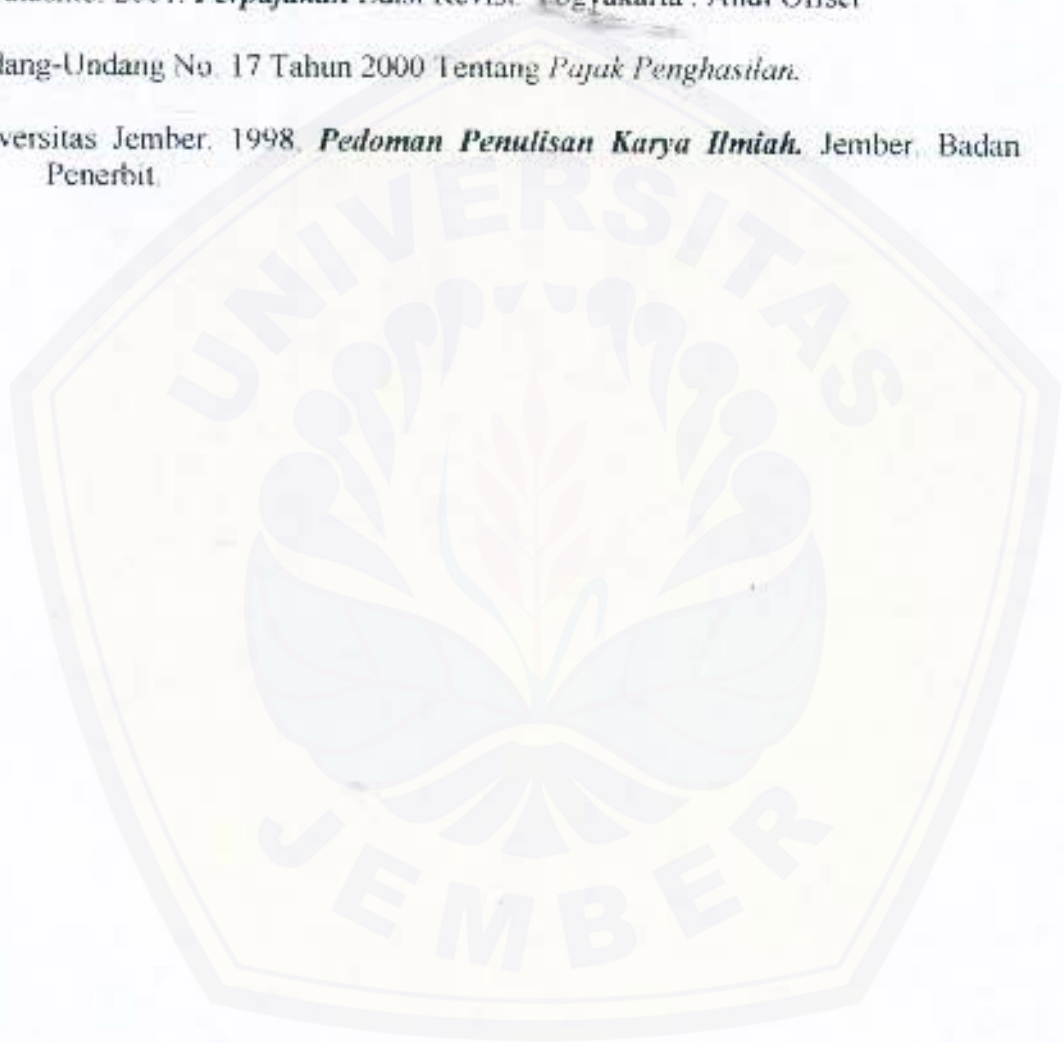
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul "Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember" dengan sebaik mungkin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini khususnya kepada PT Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan telah memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan pemotongan PPh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Semoga penulisan laporan ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. Surat Edaran Keuangan Nomor 301/X/28/KA. 2000 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PPh pasal 23 di Lingkungan PT. Kereta Api (Persero)*. Bandung.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Badan Penerbit.





SURAT - TUGAS

No. : 1324 / J.25.1.2/PP.9/2005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Arlyn Trinawangsih	02 - 1066	D - III Pajak
2.	Dewi Puspitawati	02 - 1072	D - III Pajak

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 April s/d 31 April 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 22 Maret 2005

Ung Nasdia B. Sw, MS
674 836

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



SURAT KETERANGAN

No : 42/SDM/IVI/D.IX.2005

KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH OPERASI IX JEMBER

MENERANGKAN BAIWA

Nama : ARLYN TRINAWANGSIH
Tempat / Tgl. Lahir : Jember, 21 Januari 1984
Universitas : Universitas Jember
NIM : 020903101066
Fakultas / Jurusan : D.3 Perpajakan
Alamat : Jl. Bungur II / 7 Jember

TELAH MENYELESAIKAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI KANTOR PT.KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN
TERHITUNG MULAI :
TANGGAL 01 APRIL S/D 30 APRIL 2005.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 29 April 2005

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember





PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

Digital Repository Universitas Jember



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PROGAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

DI
PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER

NAMA : ARLYN TRINAWANGSIH
NIM : 020903101066

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	TANDA TANGAN
1	Jumat, 1 April 2005	07.15-12.00	1. [Signature]
2	Senin, 4 April 2005	13.00-16.00	2. [Signature]
3	Selasa, 5 April 2005	07.15-12.00	3. [Signature]
4	Rabu, 6 April 2005	07.15-12.00	4. [Signature]
5	Kamis, 7 April 2005	07.15-12.00	5. [Signature]
6	Jumat, 8 April 2005	07.15-12.00	6. [Signature]
7	Senin, 11 April 2005	07.15-12.00	7. [Signature]
8	Selasa, 12 April 2005	07.15-12.00	8. [Signature]
9	Rabu, 13 April 2005	07.15-12.00	9. [Signature]
10	Kamis, 14 April 2005	07.15-12.00	10. [Signature]
11	Jumat, 15 April 2005	07.15-12.00	11. [Signature]
12	Senin, 18 April 2005	13.00-16.00	12. [Signature]
13	Selasa, 19 April 2005	13.00-16.00	13. [Signature]
14	Rabu, 20 April 2005	13.00-16.00	14. [Signature]
15	Kamis, 21 April 2005	13.00-16.00	15. [Signature]
16	Jumat, 22 April 2005	13.00-16.00	16. [Signature]
17	Senin, 25 April 2005	13.00-16.00	17. [Signature]
18	Selasa, 26 April 2005	13.00-16.00	18. [Signature]
19	Rabu, 27 April 2005	13.00-16.00	19. [Signature]
20	Kamis, 28 April 2005	13.00-16.00	20. [Signature]
21	Jumat, 29 April 2005	13.00-16.00	21. [Signature]

Jember, April 2005

Mengetahui
Kasubsi Pendayagunaan Keuangan
Daerah Operasi IX Jember

[Signature]
Drs. Purwadi
Nipp. 22792

Pelaksana
Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
Pengesah Pembayaran

[Signature]
Sukarno
Nipp. 36360

UTAMAKAN KESELAMATAN DAN PELAYANAN

Jl. Dahlia No. 2 Jember 68116 - Telp. (0331) 487067 - 421700 - 421825, Fax. (0331) 487087



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : ARIYU TRINAWANOSIH
 Nomor Induk Mahasiswa : 020903101050
 Alamat : JL. BUNGUR II NO. 8 JEMBER
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : TATA CARA PEMOTONGANPAJAK PENGHASILAN
 (PRH) POKOK BUNYI PENGHASILAN TERAP PADA PL. V RUMAH
 RUMAH (PERSEOR) DAOP EK JEMBER
 Dosen Pembimbing :

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Senin/16 mei 05	10.00	JUDUL	
2.	Rabu/28-09-05	08.30	Konsultasi Bab I dan II	
3.	Senin/10-10-05	09.15	Konsultasi Bab III,IV	
4.	Selasa/15-11-05	11.00	Revisi	
5.	Jum'at/25-11-05	10.45	ACC	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.

REKAPITULASI PERSEK
 ...
 ...
 ...

REKAPITULASI PERSEK JANGKALAN PERSEK ...

REKAPITULASI PERSEK
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

Saluran pembayaran			M O D A L			KETERANGAN	
NO URUT	TANGGAL	JUMLAH	NO URUT	TANGGAL	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6		
0010/11/2004/01X	24/06/2004	20.148.700,00	1000/1251117014/07/2004/250/04	11/06/2004	20.148.700,00	3x Gaji, uang 170.000	
			1006/201000/008/07/2004/250/04	12/06/2004			
	Jumlah raya	20.148.700,00	DUA PULUH LUTA DEKATU DEBELISA ANAK DELAPAT----- DUA RATUS RATUS DUA PULUH RATUS-----				

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

DRS. PURJADI
 NIP/9 12792

...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...

Handwritten signature and date

T. API (PERSERO)
 Pusat Dinas
 S. 10000
 P. 10000
 P. 10000

SEKSI PROPERTI

LEMBANG PENGELUARAN UANG (SPU) No. 0007/JR/PROP/0707/2004

Jember, 24 Juni 2004

Kepada
 Yth. Kepala Kantor BPT 1900
 Jember
 di Jember

Sehubungan dengan surat, agar Saudara agar bermitra dengan stasiun lingkungan...
 dan penganggaran tahun-tahun berikutnya seperti tertera dalam daftar di bawah ini :

Caran: pembayaran		No. 4000		Asterangan	
No. Urut	Tanggal	Jumlah	Uraian	Tanggal	Revisi
1	1	5			
Jumlah 12,8		118.872,00	SWAN BANGUN KAWAN BELAT SIBI BELAT... KAWAN BELAT		

PENGESAHAN REVISI
 BANTU PENGESAHAN REVISI

 DRS. E. P. 001
 HIP/001

Swan stasiun di 19,
 dan dan...
 di 1900...

di Coret yang bisa perlu

dicatat tgl 24/06/2004

25/6/04

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran 6
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (1)
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

Identitas Pemotong Pajak

N P W P : 0 1 0 0 0 0 1 6 4 6 2 6 0 0 1 (2)

ma : PT. KRISTA API DAOP IX JEMBER (PER EMG)

mat : Jl. Dahlia No. 2 Jember

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Juli tahun 2004 (3)
dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.) (4)	PPh yang dipotong (Rp.) (5)
Pegawai Tetap	0111/100	746	1.051.711.655,00	29.901.134,00
Pegawai Tidak Tetap yang PPh-nya ditanggung Pemerintah				
Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
Pegawai Harian /Mingguan	0111/100			
Pegawai Satuan	0111/100			
Pegawai Berongan	0111/100			
Pegawai Honorier	0111/100	7	2.600.000,00	130.000,00
Penerima Pegawai yang menerima gaji, Tunjangan, dan Bonus	0111/100			
Penerima manfaat pada Dana Pensiun	0111/100			
Pegawai Tugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
Pegawai Tugas Penjaja Barang	0111/100			
Pegawai Distributor MLM direct selling	0111/100			
Pegawai Nagas Ahli	0111/100			
Penerima Honorarium atas imbalannya	0111/100			
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0111/100			
J U M L A H			1.054.311.655,00	30.031.134,00

Perhitungan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya

-

Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan

-

Tiga puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah.

bilang :

Surat Penghasilan Pasal 21 yang dipotong Final

Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPH yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401	-	-	-
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100	-	-	-
J U M L A H			-	-
Terbilang : *)				

Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

Jember Tanggal - 1 JUL 2004
..... 20..... (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap



(Handwritten Signature)
TRI KOMARU
NIP. 2003..... (8)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
 Untuk Arsip WP

NPWP : 01 - 0000 - 016 - 4 - 626 - 001

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
 NAMA WP : PT. KEREPA SP. DAFTAR JEMBER (PER. BSO)
 LAMAT. : Jl. Dahlia No. 2 Jember

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
111	100	PPH Ps. 21

Masa Pajak										Tahun	
Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	JUL	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2004
Diisi tahun terdanganya pajak											

Nomor Ketetapan : / / / /
 sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 30.031.134.00
 Terbilang : Tiga puluh juta tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
 Tanggal 2004
 Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor
 tgl 2004
 Cap dan tanda tangan
 Nama Jelas :
 2004

uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

015/07
 007/07
 009/07

LAMPIRAN I-A
 PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN
 HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)
 * LAMPIRAN PADA FORMULIR 1721-A

UNTUK KPP
 UNTUK PEMOTONG PAJAK
 UNTUK PEGAWAI
 FORMULIR
 1721 - A1
 TAHUN TAKWIM
 2004

4. NOMOR URUT : 0445
 5. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. KERETA API (PERSERO) DACB
 6. NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 000 015 4 625 001
 7. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. DANLIA NO.2 JEMBER
 8. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT : SUKARNO
 9. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT :
 10. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT : 404 KEMANGKOH
 11. JABATAN : PELAKSAMA
 12. STATUS DAN JENIS KELAMIN : (X)Kawin Tidak Kawin Perempuan
 13. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : 2/2 YK
 14. MASA PROSES PENGHASILAN : Januari 2004 s.d. Desember 2004
 15. KINCIAH PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BERAGAL BERIKUT : (DENGAN DUNJAE)

1. PENGHASILAN BRUTO

1. GAJI/PENSUN/THT	18.117.753
2. TUNJANGAN PPh	515.367
3. TUNJANGAN LAINNYA, HANG LEMBU, DSB	450.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	119.470
5. PENSI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	0
6. PENERIMA DALAM BENTUK NATURA DAN KEMUKHTAN LAINNYA YANG DIXENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	1.100.000
7. JUMLAH (1 s.d 6)	1.851.736
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN LAIN	1.451.301
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	1.305.041

1. PENGURANGAN

10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	0
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	0
12. URAH PENSUN, URAH THT	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	2.372.286

* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13)	18.927.753
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETANJUN/DISETAHUNKAN)	18.927.753
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	7.200.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETANJUN/DISETAHUNKAN (16-17)	11.727.753
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETANJUN/DISETAHUNKAN	586.387
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
21. PPh PASAL 21 TEROTANG	586.387
22. PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	60.544
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	525.843
24. PPh PASAL 21 DAN PPh YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	571.948
25. JUMLAH PPh PASAL 21	151.895
26. JUMLAH TERSEBUT	153.895

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KW/24

NAMA TERANG



PERUMPAH 2003

01/01/2004

AN / DIBAYAR DENGAN CEK /
BILYET GIRO *)
NO _____
BENDAHARAWAN _____

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR: 013.07.2004-0 IX - 00

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biro tidak untuk diuangkan

RAWAN KAS: STASIUN *) JEMBER
BESAR/KANTOR-PUSAT

DSL JEMBER

MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA
STASIUN JEMBER

Tgl. RONALD ✓

NIPP: 20094

JUMLAH: RP 20.198.770,00 DENGAN HURUF DUA PULUH JUTA SERATUS DEWELAH PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH RUPIAH

AN : Pembayaran Setoran PPh pasal 21 Bulan 7/2004
Untuk KPP Wilayah Jember

NO. 401/XII/2/KA-2003
NO. KPD-005
11/013/07/2004/270/04
005/028/07/2004/290/04
Tgl: 21/06/2004
Tgl: 21/06/2004
Tgl: 21/06/2004

CATATAN:

JEMBER Tgl. 24 Juni 2004

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN *)

(Signature)
Tgl. PURWATI

NIPP 22792

PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
01..... / 2119	20.083.770,00
01..... / 2119	135.000,00
..... /	
..... /	
..... /	
J U M L A H	20.198.770,00
PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
01..... / 1051	20.198.770,00

Telah diterima
Tgl

Pembuat
(Signature)
HERSYATI

NIPP

*) Coret yang tidak perlu

MEMBAYAR DENGAN CEK/
BILYET GIRO *)
NO
BENDAHARAWAN

SEKSI PROPERTI
BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR : 0007/07-2004-PROP. 1 + 0

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biri tidak untuk diuangkan

BENDAHARAWAN KAS : STASIUN *) JEMBER
BESAR/KANTOR PUSAT

DSL JEMBER

WAKILAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA TEL. BOHEDI ✓
STASIUN JEMBER

NIPP : 26094

BILYET GIRO :

JUMLAH : RP. 619.872.00 DENGAN HURUF (ENAM RATUS DELAPAN BELAS RIBU DELAPAN PATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH)

ALUAN : Pembayaran Setoran PPh pasal 11 Bulan 7/2004 ✓
Untuk KPP Wilayah Jember

KU. 401/XII/2/KA-2003
NO. NPD-400
11006/029/07/2004/290/04
TGL: 22/12/2003
Tanggal
21/06/2004
Tanggal

CATATAN:

JEMBER Tgl 24 Juni 2004

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN
NIPP

0007/07/PROP. 9/07/2004 TGL: 24/06/2004

PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
2113	619.872.00
JUMLAH	619.872.00
PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
051	619.872.00

Telah diterima Tgl

Pembuat
NIPP

*) Corot yang tidak perlu

...AR DENGAN CEK/
...YET GIRO *)
NO
BENDAHARAWAN

DIVISI BARANA

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR : 0204/112/2004-027304

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk dituangkan

BENDAHARAWAN KAS: STASIUN *) JEMBER
BESAR / KANTOR PUSAT

DSL JEMBER

...LAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA
STASIUN JEMBER

DR. PURWATI

NIPP : 29324

GIRO :

JUMLAH : **RE 9.213,492,00** DENGAN HURUF (SEBELAS JUTA DUA RATUS TIGA BELAS RIBU
SIAPAT RATUS SEBELAS PULUH DUA TUPIAH)

...AN : Pembayaran Setoran PPh pasal 21 Bulan 7/2004.
Untuk KPP Wilayah Jember

KU-401/111/2/KA-2003 TGL: 22/12/2003
NO. HPP-ACC Tanggal
16210/002/07/2004/290/04 21/06/2004
11000/003/07/2004/290/04 21/06/2004
Tanggal / /

CATATAN :

JEMBER Tgl: 14 Juni 2004

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

DR. PURWATI

NIPP 29324

PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
10000000000	9.213.492,00
10000000000	9.213.492,00
10000000000	9.213.492,00
10000000000	9.213.492,00
10000000000	9.213.492,00
J U M L A H	9.213.492,00
PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
10000000000	9.213.492,00

Telah diterima
Tgl

Pembuat
DR. PURWATI

NIPP 29324

*) Ceret yang tidak perlu

PEG. ORGANIK

Lampiran 1a+b

POSISI AKHIR TRW/2004	JML	PENGURANGAN					JML	POSISI		PENAMBAHAN			POSISI AKHIR TRW T-2004		
		PEN SULH	BUR HEND	MDU NIM	PIV LPH	KO REK SI		ST. PENJU RAYAN	RE. KRUT VEN	PIN DAH AN	KO REK SI	JML			
GOL IV	19-21						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-24						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25-27						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28-30						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31-33						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34-36						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37-39						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40-42						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43-45						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46-48						0	0	0	0	0	0	0	0	0
49-51						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52-54						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55-56						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JML	162	1	0	0	0	0	32	32	146	0	0	0	36	35	192
GOL II	18-21	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22-24	14					0	14	0	0	0	0	0	0	14
	25-27	62					21	26	0	0	0	0	0	0	29
	28-29	78					0	78	0	0	0	0	0	0	62
	31-33	36					0	34	0	0	0	0	0	0	60
	34-36	5					0	5	0	0	0	0	0	0	9
	37-39	5					0	5	0	0	0	0	0	0	9
	40-42	22					12	17	0	0	0	0	0	0	17
	43-45	62					9	57	0	0	0	0	0	0	57
	46-48	277					122	153	0	0	0	0	0	0	150
49-51	193					9	348	0	0	0	0	0	0	349	
JML	162	1	0	0	0	32	32	146	0	0	0	36	35	192	

PEG. ORGANIK

TRIWULAN II TAHUN 2004

Lampiran 1810

URAIAN	JML	PENYERJAHAN					JML	POSISI STL PENGU SANGAN	RE KEJU WEN	PENYERJAHAN		POSISI AKHIR TRW II TR 2004
		PER SILU	REK HEK	MDU WA	FIN DAH	KO REK SI				PIN DAH AN	KO REK SI	
18-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-33	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
34-38	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0
37-39	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0	43	0
40-42	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38	0
43-45	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0
46-48	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0
48-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52-54	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
55-55	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
JML	228	0	0	0	0	34	184	0	0	22	22	218
18-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-24	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0
25-27	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0
28-30	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65	0
31-33	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	73	0
34-38	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0
37-39	57	0	0	0	0	0	57	0	0	0	57	0
40-42	52	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52	0
43-45	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	48	0
46-48	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0
48-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52-54	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
55-56	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
JML	622	0	0	0	0	247	374	0	0	247	247	624

PERHATIAN:

Untuk kepentingan Audit oleh Penguas Hilam, setiap data yang dicantumkan pada formulir ini harus sesuai dengan kondisi lapangan setempat.

